

DINAMIKA POLITIK PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN CABANGKECAMATAN BAWEN PADA 1996 – 2001

Dra. Emy Wuryani, M.Hum., Dr. Wahyu Purwiyastuti, S.S., M.Hum., Maria
Dominika Tyas Kinasih

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

emy.wuryani@uksw.edu, wahyu.purwiyastuti@uksw.edu,
152019001@student.uksw.edu

Abstrak

Atmosfer politik yang berlangsung di sekitar tahun 1996 – 2001 berpengaruh hingga tingkat cabang. Hal tersebut dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian dikenal dengan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apa yang dilakukan oleh para kader PDI di tingkat pusat membawa dampak bagi dinamika yang terjadi di tingkat bawah, khususnya di wilayah Kecamatan Bawen. Para kader PDI Bawen selalu menyesuaikan diri terhadap kondisi politik yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika politik PDIP Kecamatan Bawen tahun 1996-2001 dan sikap para kader PDIP Kecamatan Bawen ketika menghadapi permasalahan politik yang terjadi di tahun 1996-2001. Hasil penelitian menunjukkan: 1) dinamika pengkaderan anggota PDIP cabang Bawen penuh tantangan, sikap dan semangat para kader sangat penting dalam praktik berorganisasi; 2) proses pengkaderan dilakukan melalui inisiatif kader cabang Bawen sendiri; 3) pengetahuan tentang pergerakan PDI Bawen sebagai suplemen bagi pelajaran sejarah SMA.

Kata kunci: dinamika politik, PDIP cabang Bawen, pengetahuan

Abstract

The political atmosphere around 1996-2001 affected the branch level. This was experienced by the Indonesian Democratic Party (PDI), which later became known as the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). What was done by PDI cadres at the central level had an impact on the dynamics that occurred at the lower levels, especially in the Bawen Sub-district area. PDI Bawen cadres always adjust to the political conditions that occur. The purpose of this research is to explain the political dynamics of PDIP Bawen Sub-district in 1996-2001 and the attitudes of PDIP Bawen Sub-district cadres when facing political problems that occurred in 1996-2001. The results showed: 1) the dynamics of the cadre of PDIP Bawen branch members are full of challenges, the attitude and spirit of the cadres are very important in organisational practice; 2) the cadre process is carried out through the initiative of the Bawen branch cadres themselves; and 3) the history and dynamics of cadre in PDI Bawen are useful as complementary knowledge for history lessons in high school.

Keywords: political dynamics, PDIP Bawen branch, knowledge

PENDAHULUAN

Pada pemerintahan Presiden Soeharto hingga saat ini, sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila (Aditya 2021). Sistem demokrasi ini memberi ruang bagi partai politik untuk berkembang. Hingga saat ini, terdapat berbagai partai politik yang dengan ciri khas masing-masing yang siap untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Partai politik merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan cara untuk berkompromi di tengah persaingan politik, serta menghadirkan kepemimpinan politik secara sah dan damai. Partai politik memiliki peranan: a) pendidikan politik; b) sumber rekrutmen bagi masyarakat untuk mengisi posisi dalam kehidupan bernegara; c) wadah yang mewakili kepentingan rakyat, dan penghubung antara penguasa dengan rakyat (Gaffar. 1988) Partai politik memiliki peran yang berkaitan erat dengan dinamika.

Kondisi partai politik mengalami prosesnya. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pemerintah yang berkuasa. Setiap partai politik memiliki caranya masing-masing untuk menghadapi atmosfer politik tersebut. Berkaitan dengan hal itu, iklim politik dalam suatu negara memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberadaan partai politik. Salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan pecahan dari Partai Indonesia Demokrasi (PDI).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merupakan salah satu partai dengan basis massa terbesar di Indonesia. Awalnya, PDIP merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada 10 Januari 1973. PDI merupakan himpunan dari 5 partai politik yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba, Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Pemerintah Presiden Soeharto lalu melakukan penyederhanaan partai yang berfungsi untuk mewujudkan stabilitas politik agar pembangunan dalam negara dapat terlaksana (Karim 1983). Fusi tersebut dilakukan atas dorongan pemerintah yang kemudian

dikukuhkan dengan UU No. 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Fadjar 2008).

Pada tahun 1993, pemerintahan Presiden Soeharto turut ikut campur dalam pemilihan Ketua PDI dengan menerapkan pemilihan dengan sistem formatur yang dianggap lebih baik daripada sistemvoting (Imawan 1997) Intervensi yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto tersebut dilakukan dengan maksud untuk mengurangi sepak terjang Megawati Soekarnoputri di kancah politik (Anonim 1993). Puncaknya adalah ketika pemerintah pemerintahan Presiden Soeharto melakukan intervensi pada kongres luar biasa PDI di Medan yang memaksa Megawati Soekarnoputri untuk turun dari jabatannya dan digantikan oleh Soerjadi (Imawan 1997).

Megawati dan pendukungnya menolak hasil kongres tersebut dan melancarkan tuntutan tersebut karena pemerintah ikut andil dalam urusan pemilihan ketua PDI. Melalui ABRI, pemerintahan Presiden Soeharto memutuskan untuk melakukan aksi untuk menghentikan massa PDI. Pada 27 Juli 1996, kantor PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta diserang oleh segerombolan orang yang mengaku sebagai pendukung Soerjadi.(Arya 1996) Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa “kudatuli” yang merupakan singkatan dari kata Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Kondisi yang terjadi di tingkat pusat berpengaruh terhadap pendukung Megawati yang berada di tingkat Kecamatan Bawen. Pergerakan PDI di Bawen sejak 1996-1998 diawasi oleh pemerintah. Bahkan, beberapa kader PDI Bawen yang mendukung Megawati harus melakukan pergerakan partai secara diam-diam (Wawancara pada Tugiman, 2023). Megawati Soekarnoputri mengubah nama PDI menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat menjelang pemilu pada tahun 1999 (Sari 2023). Kondisi tersebut membawa angin segar bagi para kader PDI Bawen yang kemudian dikenal dengan PDIP Cabang Anak Ranting Kecamatan Bawen. Para kader politik ini memilih untuk bergerak menunjukkan eksistensi partai (Wawancara pada Soewartono, 2023).

Keberadaan PDIP di percaturan politik Indonesia memiliki dinamika sampai ke tingkat bawah. Dinamika yang dialami oleh partai politik tersebut di

tingkat bawah, seperti di tingkat Kecamatan jarang dibahas dalam berbagai literatur. Namun, dinamika tersebut menjadi daya tarik untuk dikaji lebih lanjut, sehingga dapat menambah wawasan mengenai sejarah politik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi persoalan pengetahuan apa yang bisa diperoleh bagi masyarakat.

METODE

Penelitian menggunakan metode sejarah. Tahapan penelitian adalah memilih topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kuntowijoyo menyatakan bahwa pemilihan topik didasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual (Kuntowijoyo, 1995). Syarat topik perlu mencakup 5W+1H (*What, Where, When, Why, Who, dan How*). Penulis menentukan topik berdasarkan pengalaman dari orang tua di sekitar lingkungan penulis yang pernah terjun dan berkiprah sebagai kader PDI yang mendukung Megawati di tingkat Kecamatan Bawen sejak 1975. Tahap berikutnya adalah heuristik yang berarti pencarian sumber sejarah secara lisan, tulisan, atau benda. Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang terlibat secara langsung dalam pergerakan PDI selama 1996-2001 dan anak dari pelaku sejarah yang mengalami pergerakan PDI selama 1996-2001. Selain itu, penulis juga mencari sumber dengan buku-buku sejarah, koran yang terbit pada 1996-2001 di Museum Pers Surakarta, buku, dan jurnal yang membahas mengenai pergerakan PDI pada 1996-2001. Setelah melakukan heuristik, tahap yang dilakukan adalah verifikasi. Tahap verifikasi dilakukan dengan cara mengkritik keaslian sumber dan sumber yang dapat dipercaya. Sumber-sumber yang telah ditentukan lalu ditafsirkan dengan cara diuraikan dan disatukan. Penulis mengkritisi hasil wawancara, koran, buku, dan jurnal yang telah ditemukan. Kemudian, penulis membandingkan hasil tersebut dan menggunakan data dari sumber sejarah yang mendekati kebenaran. Tahap selanjutnya adalah menuliskan kembali peristiwa bersejarah berdasarkan data yang telah terkumpul, yakni dari hasil wawancara, buku, koran, dan jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jejak Peristiwa Berdirinya PDIP

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto terdapat aturan yang menyatakan untuk penggabungan partai. (Adryamarthanino 2021) Beberapa partai seperti: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mengalami peleburan. Kelima partai Islam yakni NU, Parmusi, Perti, dan Partai Syarikat Islam Indonesia disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdiri pada 5 Januari 1973. Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia yang mencakup unsur PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI didirikan pada 10 Januari 1973. (Eko. 2020) Setelah itu, PDI menyelenggarakan Kongres IV di Medan pada 21 Juli 1993. Dalam kongres tersebut, Soerjadi terpilih sebagai ketua. Pada Agustus 1993, Menkopolkam Soesilo Soedarman menyatakan bahwa Kongres Medan tidak sah dan Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya diselenggarakan. Melalui KLB pada 2 – 6 Desember 1993, nama Megawati diajukan sebagai calon ketua dan ditunjuk sebagai Ketua Umum (Ketum) PDI 1993-1998 secara de facto. Secara aklamasi, Megawati menjadi Ketum PDI pada 22-23 Desember 1993 melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Kemang, Jakarta Selatan (Prinada 2021).

Pada tahun 1996, PDI Megawati mengalami kegoncangan dalam internalnya. Penyebabnya adalah terdapat laporan yang menyatakan bahwa Departemen Dalam Negeri dan ABRI meminta PDI untuk menandatangani Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan dilakukan tanggal 20-23 Juni 1996. Akibatnya, terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh PDI. Hasil KLB di Medan berlanjut dengan pengambilalihan PDI yang dipimpin oleh Megawati hingga meletusnya peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996. Masyarakat awam menyebutnya dengan istilah Kuda Tuli (Aspinall 2005).

Pendukung Megawati dan Soerjadi mengalami konflik pada 27 Juli 1996. Kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 58 Jakarta Pusat

dikuasai oleh kelompok pendukung Megawati dan mereka yang tidak berhasil melawan Soerjadi, lalu membakar bagian belakang kantor. Kelompok Soerjadi akhirnya berhasil menguasai kantortersebt. Aksi antara kedua kelompok itu akhirnya berhasil dipadamkan oleh aparat keamanan (Arya 1996).

Peristiwa Kuda Tuli tersebut melahirkan konflik internal yang berkepanjangan dalam percaturan politik antara PDI Soerjadi dan PDI Megawati. Pada 29 Mei 1997, pemerintah menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peserta pemilu ada tiga yaitu PDI Soerjadi, PPP, dan Golkar. Saat itu, PDI Megawati tidak masuk sebagai peserta Pemilu 1997 karena pemerintah Soeharto tidak mengakui kepengurusan PDI di bawah kepemimpinannya. Megawati tidak menggunakan hak politiknya dalam pemilu ini, karena hanya PDI Soerjadi yang diakui oleh pemerintah.(Firdausi 2019) Setelah pemilu berlangsung, terjadi krisis yang berkepanjangan. Nilai mata uang rupiah menurun, karyawan diputus hubungan kerja serta utang luar negeri meningkat. Berdasarkan masalah ekonomitersebut, muncul protes dan tuntutan dari berbagai tempat. Unjuk rasa terjadi karena mendesak Presiden Soeharto turun dari jabatannya (Kurniawan 2018). Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pemerintahan.

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto membuka jalan bagi PDI untuk berjuang. Kepala pemerintahan berikutnya yaitu Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik. Momentum ini dimanfaatkan oleh Megawati untuk mengembangkan partai politik. Megawati menyelenggarakan Kongres PDI V di Bali 8-10 Oktober 1998. Dalam kongres ini, Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 memiliki tanggung jawab menjalankan organisasi dengan baik. Kewenangan itu terdapat dalam AD-ART PDI. Adapun AD-ART salah satunya berisi tentang penggantian nama partai menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membedakan dengan PDI Soerjadi (Hasibuan 2015). Agar dapat mengikuti Pemilu 1999, Megawati kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan. Tanggal 1 Februari 1999 perubahan nama partai tersebut

disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal. Nama ini laludideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan Jakarta (Suroso 2019) Susunan pengurus PDIP 1999 adalah sebagai berikut: Megawati sebagai Ketua Umum, Soetjipto Soejono sebagai Sekretaris Jenderal, Pramono Anung sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Yuliawan 2001).

B. Dinamika Politik PDIP Bawen Tahun 1996 – 2001

Dualisme kepemimpinan dalam tubuh PDIP membuat para pendukung Megawati di Kecamatan Bawen melakukan suatu gerakan. Para kader PDIP Bawen bergerak dan berjuang dengan hati-hati di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Kader PDIP Bawen selalumemantau perkembangan PDI pusat melalui berbagai media, seperti: koran, radio, dan televisi (Wawancara kepada Tugiman, 2023). Soewartono juga melakukan pemantauan perkembangan PDI pusat melalui sambungan telepon kabel antar kader partai, karena tidak semua kader memiliki telepon genggam. Soewartono menyatakan bahwa perkembangan yang terjadi di pusat memiliki peran penting bagi kader PDI di Bawen untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan (Wawancara kepada Soewartono, 2023).

Para pendukung Megawati di Kabupaten Semarang melakukan di depan kantor DPRD Kabupaten Semarang, yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang pada bulan Juli 1996. Mereka menyerukan tuntutan agar pemerintah mengakui PDI dipimpin oleh Megawati, bukan Soerjadi. Beberapa kader PDIP Bawen yang termasuk dalam jajaran pengurus seperti: Tugiman, Soewartono, Siswantoro, dan beberapa kader lainnya mengikuti aksi tersebut. Aparat keamanan menjaga kantor DPRD Kabupaten Semarang dengan ketat. Mereka juga mengenakan pakaian serba merah dan berlambang banteng yang membuat kader PDIP Bawen perlu berhati-hati, karena apabila bertindak di luar keamanan, dapat berisiko (Wawancara kepada Tugiman, 2023).

Pada tahun 1996, pemerintah mengutus pembina politik di setiap daerah. Pembina politik saat itu berasal dari golongan ABRI, bukan dari kalangan partai politik. Pembina politik menjadi 'alat' bagi pemerintah untuk memantau

pergerakan partai politik di bawah. Beberapa kader PDI Bawen memainkan strategi ketika berhadapan dengan pembina politik ini, termasuk dalam aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Semarang.(Wawancara kepada Tugiman, 2023)

Para kader PDI Bawen seperti Siswantoyo, Tugiman, Lilik, dan Soewartono saling menjaga agar langkah yang dilakukan tidak salah. Bahkan, para kader tersebut saling memastikan wajah dan mengenali kader masing-masing dengan baik. Para kader itu juga benar-benar mengamati kader PDI Bawen yang asli dan pihak yang menyamar, sehingga mereka mampu membedakan. kader PDI Bawen pun melakukan sikap jika ada tindakan yang sifatnya defensif ditengah-tengah peserta aksi.(Wawancara kepada Soewartono, 2023) Mereka berdiri dengan berdekatan agar berada dalam satu koordinasi. Para kader tidak mengenakan pelindung apapun meskipun aparat keamanan bersenjata lengkap. Mereka hanya berpikir berjuang untuk menegakkan kebenaran dan demokrasi bagi rakyat.(Wawancara kepada Djajak, 2023)

Beberapa kader partai, simpatisan, dan pendukung Mega melemparkan botol plastik ke arah aparat keamanan dalam menyerukan tuntutan tersebut. Kelompok tersebut tidak akan berhenti melakukan aksi, apabila seruan mereka tidak didengarkan. Kolonel Tukijan, salah satu personel menerima lemparan botol plastik karena berusaha menenangkan peserta aksi yang antusias menyerukan Mega sebagai ketua PDI. “Mega! Mega! Mega!” Demikian seruan kelompok pro

Mega saat itu.(Wawancara kepada Tugiman, 2023)

Massa tidak menyerah dan terus menyerukan yel-yel perjuangan pada masa itu. Mereka yang tergabung dalam DPC PDI Kabupaten Semarang tidak gentar meskipun di sekelilingnya ada kawat berduri dan dijaga ketat. Massa berteriak semakin kencang sampai menang. Soewartono mengajak kader PDI Bawen untuk berteriak secara lantang.(Wawancara kepada Soewartono, 2023) Kolonel Tukijan dan beberapa personel lainnya akhirnya menyerah. Mereka mengakui adanya PDI yang dipimpin oleh Mega. Setelah peristiwa tersebut, para kader PDI Bawen senantiasa bergerak dan memperjuangkan kekuatan partai.(Wawancara kepada

Tugiman, 2023) Siswantoro juga melakukan hal yang sama. Siswantoro secara diam-diam mengajak beberapa warga di sekitar tempat tinggalnya untuk bergerak memperjuangkan PDI Bawen. (Wawancara kepada Djajak, 2023)

Bergerak dan berjuang di bawah pemerintahan Presiden Soeharto bukanlah hal yang mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para kader PDI Bawen. Para kader merasa tidak nyaman dan aman. Pergerakan dan perjuangan yang dilakukannya selalu diawasi oleh aparat keamanan, baik di tingkat bawah (Kelurahan) hingga tingkat atas (Kabupaten). Beberapa personel keamanan diberikan tugas oleh pemerintah untuk mengawasi kader PDI hingga tingkat bawah (Kelurahan). Tugiman diawasi oleh aparat keamanan ketika mengajak beberapa orang yang mau diajak berjuang dalam internal PDI. (Wawancara kepada Tugiman, 2023)

Pada 1996, beberapa kader PDI yang berjumlah 12 orang melakukan rapat di rumah Siswantoro. Mereka membahas strategi yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kekuatan dan keutuhan partai politik. Para kader tidak boleh melakukan rapat tidak diperbolehkan di atas pukul 10 malam. Apabila di atas pukul 10 malam belum selesai, mereka yang terlibat dalam rapat tersebut akan dibubarkan oleh personel keamanan. (Wawancara kepada Tugiman, 2023) Personel keamanan diam-diam sudah mengetahui adanya agenda tersebut. Meskipun demikian, kader PDI Bawen tidak pernah gentar. Mereka sering melakukan rapat dan memperjuangkan kekuatan partai politik dengan murni. (Wawancara kepada Soewartono, 2023) Siswantoro selalu mengetahui hal tersebut. Hampir setiap hari, rumahnya sering didatangi oleh aparat keamanan. Mereka ingin mengetahui sepak terjang yang dilakukan oleh kader PDI Bawen. (Wawancara kepada Djajak, 2023)

Beberapa kader PDI Bawen kembali berkumpul di rumah Siswantoro ketika PDI merayakan ulang tahunnya ke 23 tahun. Tugiman, salah satu kader PDI Bawen bertugas memimpin doa. Tampak seseorang yang bukan rekan seperjuangannya di sebelahnya. Seseorang tersebut mengenakan kaos PDI. Tugiman mengetahui bahwa orang tersebut merupakan salah satu personel keamanan. Meskipun demikian, Tugiman dan beberapa kader lainnya tidak takut.

Mereka memilihuntuk melanjutkan acara hingga selesai. (Wawancara kepada Tugiman, 2023)

Selain Siswantoro dan Soewartono, kader PDI yang juga memperoleh pengawasan dari pemerintah secara diam-diam adalah Tugiman. Tugiman pernah dicari seseorang aparat keamanan yang mengaku dari PDI Bawen di rumah. Tugiman tidak berada di rumah saat itu, karenasedang bekerja. Jumirah, istri Tugiman berada di rumah sendirian. Jumirah mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah rekan seperjuangan Tugiman, sehingga Jumirah mengatakan bahwa sangsuami sedang ke luar kota. Jumirah berhati-hati dalam menjaga pergerakan yang dilakukan oleh Tugiman. Jumirah hanya sendirian di rumah, dan ada seseorang yang mengetuk pintu secara keras. Jumirah tidak menggubrisnya. Seseorang itu mengetuk pintu dengan keras hingga Jumirahmembukakan pintu. Orang tersebut memperkenalkan diri sebagai rekan seperjuangan Tugiman. Namun, Jumirah tidak percaya. “Saya mengenal dengan baik teman-teman suami saya. Kalau suami saya salah, mana buktinya? Kalau rapat, mana undangannya?” Orang tersebut tidak mampu berkata-kata lalu pulang. (Wawancara kepada Jumirah, 2023)

Aparat keamanan gencar melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kader PDI Bawen. Mereka melakukan aktivitas itu ketika kader PDI Bawen melakukan berbagai kegiatan, seperti: rapat, kampanye, orasi, dan sebagainya. Beberapa kader PDI Bawen apabila melawan pemerintah, memperoleh ancaman akan dihilangkan seperti pada zaman G30S. Ancamandan tekanan yang diberikan tidak pernah melunturkan semangat dan tekad para kader PDI Bawen.Mereka terus maju, meskipun personel keamanan selalu mengikuti.(Wawancara kepada Tugiman,2023) Soewartono pun mengalami hal yang sama. Kader PDI Bawen tersebut pernah memperoleh ancaman akan dicari dan ditangkap oleh aparat keamanan. Bahkan, gerak langkahnya pernah diikuti oleh personel keamanan yang menyamar. (Wawancara kepada Soewartono, 2023)

Pengawasan dari pemerintah dan personel keamanan digunakan oleh beberapa kader PDI Bawen untuk mencari kader baru yang mau diajak berjuang dalam partai politik. Mereka melakukan rapat dan mencari strategi yang harus

dilakukan. Salah satu strategi tersebut adalah para kader mencari anggota pada waktu malam dan menghindari jalan yang dijaga oleh personel keamanan. Tugiman memilih untuk berjalan kaki tengah malam dan melewati sawah sebelah rumah. Tugiman memilih waktu tengah malam dan berjalan di sawah, karena personel keamanan tidak mungkin akan pergi ke sawah. Pada malam hari dan bulan bersinar terang, Tugiman mendaraskan doa di dalam hati, *“Dhuh Gusti, mbok bilih ingkang kula lampahi selaras kaliyan kersa Dalem, kula nyuwun berkah tuwin Pangayoman Dalem.”* (Ya Tuhan, apabila yang saya ikuti selaras dengan kehendak Tuhan, saya mohon perlindungan Tuhan dalam langkah saya.” Tugiman sedang menempuh perjalanan untuk mencari orang-orang yang akan diajak untuk bergabung dan berjuang dalam PDI Bawen namun, beberapa orang tidak bisa karena takut dengan risiko pada masa itu. Beberapa orang yang diajak umumnya kalangan masyarakat kecil, seperti gembala itik dan buruh gergaji kayu. (Wawancara kepada Tugiman, 2023)

Soewartono pun melakukan hal yang sama. Soewartono terjun langsung di tengah masyarakat di Bawen atau *blusukan*. Soewartono melakukan pendekatan kepada masyarakat di Ngemplak, lingkungan tempat tinggalnya. Setelah pendekatan, Soewartono mulai menyesuaikan diri dengan masyarakat. Soewartono mengamati karena masyarakat telah nyaman, ia kemudian berdiskusi bersama masyarakat untuk membahas lebih lanjut mengenai gerakan kaderisasi yang akan dilakukan. (Wawancara kepada Soewartono, 2023)

Berbeda dengan kader lainnya, Siswantoro mengajak masyarakat sekitar untuk datang ke rumahnya. Siswantoro dan masyarakat membahas lebih dalam mengenai keprihatinan mereka terhadap situasi politik pada masa itu. Ternyata, masyarakat memiliki keprihatinan yang sama karena kehidupan politik berada dalam kekuasaan Soeharto, sehingga mereka perlu berhati-hati dalam bergerak. Siswantoro lalu mengajak mereka untuk bergabung dalam PDI bersama kader lainnya untuk memperjuangkan keprihatinan tersebut. (Wawancara kepada Djajak, 2023)

Aktivitas yang dilakukan oleh para kader PDI Bawen itu akhirnya berdampak. Adapun dampaknya ialah membuat anggota menjadi semakin

bertambah. Beberapa kader yang baru tergabung dalam PDI Bawen mulai mengajak kenalan dan rekan lainnya. Hasilnya adalah ketika anggota sudah banyak, para kader PDI rutin melakukan diskusi secara diam-diam. Kader PDI Bawen sering berdiskusi di berbagai tempat, salah satunya di rumah Siswantoro. Diskusi tersebut akhirnya melahirkan suatu kesepakatan bersama, yakni melakukan aksi di berbagai tempat.(Wawancara kepada Soewartono, 2023) Aksi tersebut didampingi oleh para kader yang lama, seperti: Siswantoro, Soewartono, dan Tugiman.(Wawancara kepada Tugiman, 2023). Pada tahun 1997 berlangsung Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pemenang pemilu saat itu adalah partai Golkar. Kenyataan tersebut membuat kader PDI Bawen dan beberapa orang lainnya memilih untuk menjadi ‘Golongan Putih’, yakni kelompok yang memutuskan untuk tidak memilih. Ternyata, ada seseorang di dalam kelompok tersebut yang melaporkan pada pemerintah, maka personel keamanan menciduk orang yang dianggap dalam kelompok tersebut. Sasarannya adalah Tugiman, tetapi ternyata salah tangkap. Seseorang yang dicituk adalah seseorang yang di luar ‘Golongan Putih’ tersebut.(Wawancara kepada Tugiman, 2023) Selain Tugiman, Siswantoro, juga terlibat dalam rapat tersebut. Siswantoro tetap berhati-hati dan menjaga agar kader PDI Bawen tetap aman.(Wawancara kepada Djajak, 2023) Soewartono meminta para kader PDI Bawen untuk tidak mengikuti arus terhadap situasi politik yang sedang terjadi.(Wawancara kepada Soewartono, 2023)

Pada saat berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, PDI di Bawen semakin menguat.(Wawancara kepada Soewartono, 2023) PDI Bawen gencar melakukan kampanye dan kegiatan orasi sambil mengelilingi wilayah Kecamatan Bawen karena di pusat, Megawati semakin menunjukkan kekuatan organisasinya.(Wawancara kepada Soewartono, 2023) Beberapa kader PDI Bawen hadir dalam Kongres, antara lain: Tugiman, Soewartono, dan Siswantoro ketika Kongres V PDI di Bali pada 8-10 Oktober 1998. Mereka mendengarkan pidato Megawati mengenai strategi perjuangan PDI yang perlu dilakukan di tiap daerah.(Wawancara kepada Soewartono dan Tugiman, 2023) Tugiman, Soewartono, dan Siswantoro kembali menggelorakan kekuatan partai,

melalui mimbar bebas, rapat, kampanye, dan orasi ketika tiba kembali di Bawen.(Wawancara kepada Tugiman dan Soewartono 2023)

Pada 14 Februari 1999, PDI berganti nama menjadi PDI Perjuangan. Kata ‘perjuangan’ menjadi semangat bagi kader PDI untuk mencari dan mengajak masyarakat agar tergabung dalam kekuatan organisasi PDIP.(Wawancara kepada Tugiman, 2023) PDI Bawen memilih untuk mengikuti organisasi PDI Perjuangan.(Wawancara kepada Soewartono, 2023) PDIP Bawen menerjunkan beberapa kadernya ketika Kongres PDIP di Semarang pada 27 Maret – 1 April 2000. Di sana, Megawati berpesan agar kader PDIP tetap mempertahankan semangat nasionalisme dalam internal maupun eksternal PDIP, sebagaimana telah diwariskan oleh Soekarno.(Wawancara kepada Djajak dan Soewartono, 2023)

Para kader PDI Bawen merasakan bahwa pada tahun 2000, partai politik memiliki kebebasan untuk berkiprah dan berjuang. Pihak yang melakukan tindakan yang represif terhadap partai politik, akan dikenakan melalui jalur hukum.(Wawancara kepada Soewartono, 2023) Pada tahun 2001 ketika Presiden Abdurrahman Wahid lalu digantikan oleh Megawati, PDIP Bawen menunjukkan kekuatannya. Presiden Megawati yang memiliki pamor dan wibawa, semangat dalam menjalankan tampuk pemerintahan menjiwai semangat perjuangan kader PDIP. Mereka tidak takut, tetapi semakin menunjukkan eksistensi dan kekuatan PDIP.(Wawancara kepada Kustidan Tugiman, 2023)

C. Sejarah dinamika pengkaderan PDI Bawen sebagai materi pelengkap sejarah di SMA

Para kader yang mengalami dinamika hingga tahun 2001, mereka terus bersemangat mereorganisasikan kantor cabang dengan cara mencari, mengajak, dan merekrut kader baru di Bawen. Pada tahun ini, setiap kader senior di berbagai wilayah kelurahan di Kecamatan Bawen memiliki tugas untuk mencari calon kader baru. Rekrutmen calon kader baru dilakukan dengan cara melihat cara pandang personil terhadap kondisi sosial - politik perjalanan bangsa serta semangat nasionalisnya.(Wawancara kepada Kusti dan Djajak, 2023) Mereka bergerak melalui pertemuan dengan pengurus RT dan RW di wilayah kelurahan

setempat, *blusukan* atau bertemu dengan beberapa orang yang dipandang memiliki pemikiran dan semangat nasionalis, dan merekomendasikan beberapa nama calon kader untuk diajak terlibat dalam pengembangan partai. Kader PDIP tidak memandang bahwa orang ini harus berasal dari kalangan yang berpendidikan tinggi, tetapi mau berjuang untuk pergerakan partai. Kader seangkatan Tugiman, Soewartono, dan Siswantoro berasal dari berbagai latar belakang, seperti: swasta, pengusaha, buruh, kuli bangunan, dan pekerjaan lainnya. (Wawancara kepada Soewartono dan Tugiman, 2023) Salah satu contoh, Tugiman memiliki tugas untuk mencari dan menyiapkan kader. Meskipun Tugiman berasal dari wilayah Kelurahan Harjosari, tetapi Tugiman memiliki tugas untuk bergerak ke wilayah kelurahan lainnya. Awalnya, Tugiman melakukan pertemuan bersama rekan lainnya di rumah salah satu kader, yakni Siswantoro untuk membahas tentang persiapan dan pembinaan kader yang baru. Tugiman lalu bergerak ke berbagai desa untuk mencari dan menemukan kader yang mau diajak untuk berdinamika bersama. Tugiman kemudian bertemu dengan seorang pengusaha mebel, bernama Moelyadi yang bertempat tinggal di Desa Dopleng. Moelyadi merupakan Lurah di Desa Dopleng. Tugiman berdiskusi dengan Moelyadi di rumah tersebut untuk membahas mengenai dinamika PDIP sejak berdiri hingga pada tahun ini. Tugiman juga menekankan pentingnya regenerasi untuk menjaga dan mempertahankan keberlangsungan partai. Akhirnya, Moelyadi mau bergabung dalam PDIP setelah berdiskusi cukup lama sekitar 3 jam. (Wawancara kepada Tugiman, 2023)

Tugiman juga mendatangi Kusti seorang lurah di Desa Pakopen. Kusti mengajak warganya untuk aktif dan terlibat dalam partai politik. Kusti juga melakukan sosialisasi mengenai nasionalisme dan pergerakan yang telah dilakukan oleh PDIP. Kusti menyuarakan bahwa PDIP adalah menjadi salah satu ruang untuk menyalurkan berbagai pemikiran dan aspirasi politik, sehingga tubuh internal dan eksternal partai tetap hidup. Melalui partai, Kusti memperoleh banyak pengalaman dan wawasan politik. (Wawancara kepada Tugiman dan Kusti, 2023) Selain bergerak dari desa ke desa, berbagai kader juga melakukan sosialisasi. Adapun sosialisasi yang dilakukan adalah memaparkan 4 pilar kebangsaan,

yakni: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Substansi dalam sosialisasi tersebut adalah keempat pilar tersebut menjadi pedoman dan kekuatan untuk berdinamika dalam partai politik. Artinya, seorang kader politik tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan keempat pilar tersebut. Dinamika yang dilakukan harus selaras dengan keempat pilar di atas. Salah satunya adalah seorang kader politik, tidak boleh memandang suku, agama, ataupun ras. (Wawancara kepada Djajak dan Soewartono, 2023) Tugiman menyatakan bahwa partai politik menjadi salah satu sarana untuk mempersatukan berbagai perbedaan dan menguatkan semangat nasionalisme. Tugiman melakukan sosialisasi tersebut di wilayah Kelurahan Harjosari. Sosialisasi yang dilakukan bersifat sederhana, yakni berupa pertemuan dengan beberapa warga di wilayah tersebut. (Wawancara kepada Tugiman, 2023)

Kader PDIP Bawen juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kader PDIP di kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Semarang untuk penguatan internal partai dan pemenangan partai dalam percaturan politik. Salah satunya, adalah para kader akan mengadakan pertemuan dan konsolidasi mengenai kondisi partai dan pengajuan nama bakal calon yang akan berlaga di kontestasi politik. Hal tersebut perlu dilakukan agar eksistensi partai tetap terjaga. Di era pemerintahan Presiden Megawati ini, sebagai rekan seperjuangan kader PDIP Bawen, seperti: The Hok Hiong (Kecamatan Ambarawa), Kimto (Kecamatan Ambarawa), dan Soegiyono (Kecamatan Tuntang) juga memberikan pemikiran untuk kegiatan yang perlu dilakukan untuk menarik simpati masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh para kader seperti: melakukan pengobatan gratis, sosialisasi kebangsaan, dan kegiatan lainnya. Selain itu, kader dari berbagai wilayah kecamatan tersebut juga memberikan saran kepada kader PDIP Bawen untuk melakukan perkenalan dan pendekatan kepada lurah dan camat di wilayah setempat sebagai bentuk permissi sekaligus menjalin komunikasi agar diperbolehkan dalam melakukan kegiatan politik. Dengan demikian, kaderisasi dan keberlangsungan partai tetap berjalan. (Wawancara kepada The Hok Hiong, 2023)

Dinamika politik 1996-2001 menimbulkan situasi politik yang tidak

menentu. Meskipun demikian, kader PDIP Bawen tidak takut karena mereka lebih menyikapi proses yang sedang berlangsung dengan tenang. Sikap tersebut muncul sebagai suatu respon terhadap kondisi yang sedang terjadi, mengingat mereka perlu bersikap secara bijaksana dan berpengamatan luas. Para kader PDIP di cabang Bawen juga dikenal memiliki sikap dan karakter seperti ini:

1. Tulus dan ikhlas dalam memperjuangkan partai politik. Kader PDIP Bawen mempertahankan dan memperjuangkan kekuatan partai politik secara murni kendati berhadapan dengan pemerintah pada waktu itu. Mereka menolak ketika ditawari uang dan jabatan.
2. Semangat dan antusias dalam memperjuangkan organisasi. Para kader PDIP Bawen selalu berfokus pada keutuhan dan kekuatan organisasi, yakni tetap berpegang pada komitmen dan soliditas anggota. Contohnya, mereka terus maju menyuarakan dukungan untuk Megawati ketika demo di depan Gedung DPRD Kab. Semarang.
3. Bergerak dengan hati-hati dan waspada. Kader PDIP Bawen bergerak dengan waspada dan hati-hati ketika berhadapan dengan pemerintah dan aparat keamanan. Mereka selalu memperhatikan situasi dengan tajam dan cepat mengambil strategi.
4. Mengedepankan komunikasi dan kerja sama. Kader PDIP Bawen selalu melakukan komunikasi dengan cara berdiskusi dan konsolidasi di rumah Siswantoyo, salah satu kader. Mereka membahas mengenai pembagian kerja, kegiatan yang akan dilakukan, dan cara yang perlu dilakukan untuk memperkuat basis massa dan menarik simpati masyarakat.

Sikap di atas dilakukan ketika kader PDIP menghadapi situasi politik pada masa itu. Contoh, mereka memilih untuk bersikap waspada dan mengambil sikap secara bijak ketika berhadapan dengan pemerintahan Presiden Soeharto,. Dengan demikian, di tengah proses yang telah berlangsung, kader PDIP Bawen tetap mengambil sikap sesuai dengan zaman pada waktu itu. Kader PDIP Bawen melakukan pengkaderan sejak tahun 1996-2001 dengan cara: pertemuan dengan masyarakat, berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa, dan berdiskusi dengan seseorang yang dipandang memiliki persamaan visi. Cara

yang dilakukan oleh para kader PDIP Bawen tersebut dapat dipelajari dan diterapkan oleh guru dan siswa. Hal yang perlu digarisbawahi adalah beberapa cara itu bisa ditempuh untuk memecahkan persoalan dalam dunia pendidikan. Apabila dikaji lebih dalam, cara tersebut sifatnya sederhana dan mudah dilakukan.

Dinamika politik, sistem pengkaderan, semangat bekerja dalam partai politik seperti yang terjadi di PDIP cabang Bawen menjadi pengetahuan penting untuk diketahui siswa Sekolah menengah Atas (SMA) di Indonesia. Guru dan siswa dapat memanfaatkan sejarah dinamika politik PDIP sebagai suplemen tambahan untuk mempelajari sejarah politik Indonesia. Di buku teks *Sejarah Indonesia kelas 12 SMA Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018*, sejarah PDI dinarasikan sangat singkat yaitu sebagai partai politik yang mengalami penyederhanaan partai. (Gonggong 2005) Proses tersebut dapat dilihat bahwa kejadian berlangsung di pemerintahan pusat. Padahal dalam peristiwa sehari-hari di masyarakat, ada gambaran nyata di masyarakat yang menarik yakni sistem dan proses pengkaderan yang penuh dan tantangan. Peristiwa tersebut mampu menjadi pengetahuan baru yang lebih lengkap bagi guru maupun siswa.

KESIMPULAN

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terbentuk karena adanya penggabungan partai sesuai dengan aturan pemerintahan Presiden Soeharto. PDI mengalami pergolakan dalam internalnya yang disebabkan oleh campur tangan pemerintahan Presiden Soeharto. Akibatnya, PDI terbagi menjadi dua, yakni PDI Soerjadi dan PDI Megawati. Kedua partai tersebut menunjukkan kekuatannya hingga meletus peristiwa kerusuhan di kantor PDI di Menteng, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996. Peristiwa tersebut membawa dampak bagi PDI pendukung Megawati. Mereka mengeluarkan sikap ketika tahun 1997, para kader memutuskan untuk tidak menggunakan hak politiknya. Pada tahun 1998, Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul dan berpendapat, momentum ini dimanfaatkan oleh PDI pendukung Megawati. Mereka terus bergerak dan berdinamika hingga tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI

Perjuangan. Para kader berhasil mengantarkan PDI Perjuangan menang dalam Pemilu 1999. Tahun 2000, PDI Perjuangan mengadakan Kongres I PDI Perjuangan di Semarang yang membahas strategi dan kekuatan organisasi partai politik. Pada tahun 2001, Megawati menjabat sebagai Presiden yang membuat para kader PDIP semakin memperkokoh basis internalnya. Momentum sejak tahun 1996-2001 berpengaruh terhadap kader PDIP di tingkat bawah. Salah satunya adalah pengkaderan PDIP cabang Bawen.

Pengkaderan anggota PDIP cabang Bawen penuh tantangan, sikap dan semangat para kader sangat penting dalam praktik berorganisasi. Anggota PDIP cabang Bawen yang melakukan pengkaderan senantiasa menjaga dan mempertahankan keberlangsungan organisasi. Mereka menyesuaikan diri dengan atmosfer politik yang terjadi. Mereka memiliki sikap dan dinamika terhadap situasi politik yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, mereka mengoptimalkan proses pengkaderan.

Proses pengkaderan dilakukan melalui inisiatif kader cabang Bawen sendiri. Mereka melakukan berbagai kegiatan untuk mencari kader. Kegiatan yang dilakukan oleh para kader di antaranya: berdiskusi langsung dengan seseorang yang bervisi sama, pertemuan bersama masyarakat, dan pendekatan pada masyarakat. Mereka tidak membangun jaringan relasi dengan masyarakat yang berasal dari kelas menengah, seperti: tukang kayu, tukang gergaji, dan gembala itik. Proses pengkaderan yang dihadirkan bisa menambah suplemen pembelajaran sejarah di kelas.

Sejarah dan dinamika pengkaderan di PDI Bawen bermanfaat sebagai pengetahuan pelengkap bagi pelajaran sejarah di SMA. Selama ini, sejarah selalu mengangkat peristiwa penting yang terjadi di lingkup pusat. Sejarah yang mengangkat peristiwa di tingkat bawah bisa menambah historiografi politik dalam mata pelajaran sejarah SMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Rifan. 2021. "Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli: Abraham Lincoln hingga Montesqieu." Diambil 4 Juli 2023 (<https://www.suara.com/news/2021/10/07/140907/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-abraham-lincoln-hingga-montesqieu>).
- Adryamarthanino, Verelladevanka. 2021. "Fusi Partai Politik 1973." Diambil 4 Juli 2023 (<https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/12/090000079/fusi-partai-politik-1973?page=all>).
- Anonim. 1993. "Mega Hampir Pasti Terpilih."
- Arya, Dkk. 1996. "Kantor DPP PDI Terbakar."
- Aspinall, Edward. 2005. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. California: Stanford University Press.
- Drajat Adijanto, Antonius. 2023. *Wawancara pada 1 April 2023*
- Eko., Dkk. 2020. "Dwifungsi ABRI Dalam Konflik Internal PDI 1976-1998. Jurnal Pendidikan Sejarah." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9:188.
- Fadjar, A. Muktie. 2008. *Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: In-Trans PUBLISHING.
- Firdausi, Fadrik Azis. 2019. "Aliansi Mega-Bintang 1997 Menggoyang Orde Baru." Diambil 7 Februari 2023 (<https://tirto.id/aliansi-mega-bintang-1997-menggoyang-orde-baru-dfLe>).
- Gaffar., Dkk. 1988. *Fungsi dan Paranan Partai Politik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Gonggong, Anhar dkk. 2005. *Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Hasibuan, Dkk. 2015. *Gerak Sejarah Partai Banteng PNI, PDI, dan PDI Perjuangan*. DPP PDI Perjuangan.
- Hiong, The Hok. 2023. *Wawancara pada 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB*
- Imawan, Riswandha. 1997. *Membedah Politik Orba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Jakarta: Rajawali.
- Kurniawan, Hendra. 2018. "Mengenang Gejayan Kelabu."
- Kustiyah, Hj. Siti. 2023. *Wawancara pada 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB*
- Prinada, Yuda. 2021. "Sejarah Kudeta Politik PDI di Rezim Soeharto: Megawati vs Soerjadi." Diambil 7 Februari 2023 (<https://tirto.id/sejarah-kudeta-politik-pdi-di-rezim-soeharto-megawati-vs-soerjadi-f952>).

- Tugiman, Dominikus. 2023. *Wawancara pada 25 Januari 2023 pukul 20.00 WIB*
- Sari, Annisa Medina. 2023. "Sejarah Berdirinya PDIP." Diambil 13 Juli 2023 (<https://fahum.umsu.ac.id/partai-demokrasi-indonesia-perjuangan>).
- Soewartono. 2023. *Wawancara pada 28 Januari 2023 pukul 10.00 WIB*
- Suroso, Dkk. 2019. *PDI Dalam Pusaran Politik Orde Baru (1973-1998)*. Jakarta: PARA Syndicate.
- Yuliawan, dkk. 2001. "Reformasi Jumat Hampir Tiba."